

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya merupakan gabungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelumnya, yaitu Sub Bagian Penanaman Modal pada Bagian Ekonomi – Sekretariat Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Sebagai OPD baru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tengah mengadakan konsolidasi internal yang menyangkut personil, pembiayaan, prasarana dan dokumen. Disamping itu juga berusaha mengadakan perkuatan



kapasitas kelembagaan dengan koordinasi dan konsultasi ke para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, secara umum dapat diidentifikasi dan digambarkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur
 - a. Kurang idealnya rasio kebutuhan aparatur sesuai kebutuhan;
 - b. Kurang tersedianya aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
2. Pelaksanaan Pelayanan
 - a. Belum tersedianya Standar Pelayanan dan SOP Penanaman Modal;
 - b. Belum aktualnya Standar Pelayanan dan SOP Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Belum dilimpahkannya semua perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Belum terintegrasinya pelayanan penanaman modal dan perizinan secara terpadu satu pintu.
3. Sarana dan Prasarana
 - a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan;
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja.
4. Pengembangan Penanaman Modal
 - a. Belum tersedianya peta potensi investasi;
 - b. Belum tersedianya data profil potensi investasi;
 - c. Belum tersedianya dokumen kajian peluang investasi unggulan;
 - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
 - e. Belum tersedianya agenda tetap/rutin promosi penanaman modal.
5. Kemitraan
 - a. Belum tersediaya data kemitraan usaha antara UKM dengan PMDN dan PMA;
 - b. Belum tersedianya nota kesepahaman dengan asosiasi pengusaha.
6. Pengelolaan Informasi
 - a. Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi dengan BKPM dan DPMPTSP Propinsi Jawa Barat;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan database penanaman modal dan perizinan;



- c. Belum tersedianya aplikasi pelayanan penanaman modal dan perizinan berbasis teknologi informasi;
- d. Belum tersedianya sistem pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan instansi teknis daerah.

Permasalahan-permasalahan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang teridentifikasi diatas, bukanlah menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan. Namun menjadi tantangan dan motivasi untuk melaksanakan pembenahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingindicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

“KABUPATENTASIKMALAYAYANGRELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Mana Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami	Menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
	Dinamis	Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.</p> <p>Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.</p>
	Berbasis Perdesaan	<p>Berbasis perdesaan bermakna Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.</p>

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Dengan mempertimbangkan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa mendatang, maka untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqlkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Keterkaitan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan	Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami”	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqlkarimah dan Berkualitas.
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).
	Dinamis	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.



Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
	Berbasis Perdesaan	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya pada periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan bertujuan untuk memberi arahan dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dijelaskan melalui Tabel 3.4:



Tabel 3.3 Indikator Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertakwa, Berakhlakul-karimah dan Berkualitas.											
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja							
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir	
Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai keagamaan	1. Rata - rata Lama Sekolah	6.80	7.01	7.08	7.15	7.22	7.28	7.28	
			2. Harapan Lama Sekolah	12.68	13.19	13.60	14.01	14.42	14.83	14.83	
			3. Indeks Pendidikan	58.36	59.99	61.36	62.74	64.11	65.49	65.49	
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	68.52	68.63	68.73	68.83	68.94	69.04	69.04	
			2. Indeks Kesehatan	66.69	74.81	74.97	75.13	75.29	75.45	75.45	
	3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase penurunan (total fertility ratio) TFR	2.48	2.49	2.47	2.45	2.43	2.4	2.4	
			2. Persentase jumlah penduduk miskin	11.69	11.39	11.09	10.79	10.49	10.19	10.19	
			3. Tingkat pengangguran terbuka	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	
	4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.25	90.6	91.95	93.3	94.65	96	96	
	5	Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	1. Cakupan SPM Bidang Sosial								
	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						



				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata	1	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	1. PDRB Sektor Pertanian							
			2. Skor pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	69.4	71.7	74	76.3	78.6	80.9	80.90
	2	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat	1. PDRB ADHB (Juta Rp)		16,973	18,337	19,815	21,411	23,007	23,007
			2. Gini Ratio	0.3	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21
			3. Indeks Pengeluaran/daya beli							
			4. Nilai Investasi daerah (ribu Rp)	253,681,288	192,164,648	201,772,880	211,861,524	222,454,600	233,577,330	1,244,844,932
		Cara menghitung; Karcis terjual, pengunjung non karcis, dan pengunjung special event. Dihitung ulang pentargetannya per objek wisata Pengunjung wisata swasta dan desa	5. Jumlah kunjungan wisatawan	944,525	1,082,114	1,200,996	1,356,923	1,560,199	1,560,199	1,560,199
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir



Meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.26
	2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Persentase peningkatan PAD	13.07	5	5	5	5	5	5
			3. Hasil Evaluasi SAKIP	-	CC	CC	B	B	B	B
			4. Hasil Evaluasi LPPD	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			5. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	NA	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan penataan ruang terpadu	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar serta meningkatnya sarana permukiman	1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	57	5	6	5	6	5	84
			2. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam kondisi Baik	86	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	89
			3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik (persen)	43	44	45	46	47	48	48
			4. Terminal di kabupaten dalam kondisi baik	2	1	1	1	1	1	2



	2	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang aman dan sehat	1. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	4.38	5.04	5.71	6.37	7.04	7.7	7.70
			2. Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani							
			3. Indeks kualitas lingkungan hidup		68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6
	3	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	1. Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	6
	4	Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulangan bencana yang terencana, dan terpadu.	2. Desa Tangguh Bencana	7	3	3	3	3	3	22



Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance). Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam periode 2016-2021 yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari visi, misi, dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, maka diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu sebagai berikut;

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, yaitu:

Tabel 3.4. Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Nama Bidang	Faktor Penghambat
Bidang Penanaman Modal dan ESDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Sumber Anggaran 3. Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk Menunjang Promosi Investasi 4. Belum Tersedianya Rencana RUPM Kab. Tasikmalaya
Bidang Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana 2. SDM terbatas dari segi Kompetensi dan Jumlah



Nama Bidang	Faktor Penghambat
	3. Belum Adanya Aplikasi Khusus Pengelolaan Data dan Informasi yang Terintegrasi secara Online
Bidang Pelayanan dan Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana 2. Sumber Daya Manusia yang Kurang 3. Keterbatasan Anggaran 4. Belum Adanya Aplikasi Online

Sementara itu, faktor pendorong untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Nama Bidang	Faktor Pendorong
Bidang Penanaman Modal dan ESDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Promosi Investasi 2. Tersedianya Dukungan Tata Ruang Wilayah dalam Investasi 3. Sosialisasi LKPM untuk PMA dan PMDM 4. Terbentuknya Satgas Percepatan Pelaksanaan Perusahaan Kab. TSM
Bidang Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pembinaan dan Pengarahan dari Provinsi 2. Adanya Fasilitasi terkait Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Data yang Terintegrasi dari Provinsi Maupun Pusat Secara Online 3. Adanya Data Registrasi Awal Pada Bidang Pelayanan yang Terbit
Bidang Pelayanan dan Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang Baik dengan Dinas Teknis 2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Ijin 3. SDM Pengelola Perijinan

3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, maka hal tersebut selain berdasarkan pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten



Tasikmalaya Tahun 2016-2021, juga mengacu Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri adalah **Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa**. Dalam rangka mencapai visi tersebut; Kementerian Dalam Negeri merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu (a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri; (b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan; (c) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat; (d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan; dan (e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

- 1) Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;



- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- 6) Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran strategis beserta indikator utama Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;	• Jumlah peristiwa konflik sosial
		Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	• Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu • Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;	• Tingkat kualitas tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonomi baru • Jumlah Perda bermasalah • Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal • Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
		<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penerapan SPM di daerah (prov/kab/kota) • Persentase daerah yang memenuhi pelayanan dasar • Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima • Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM • Penyediaan layanan bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM • Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik
		<p>Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wskil Pemerintah
3.	<p>Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase daerah yang belanja APBDnya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat • Jumlah provinsi/kab/kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota tepat waktu • Jumlah provinsi/kab/kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual
4.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong pembangunan desa	Meningkatnya akuntabilitas kualitas dan penyelenggaraan desa dalam pemerintahan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan, dan akuntabel Jumlah desa swasembada
5.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
		Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat Penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak
6.	Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap etos kerja alumni Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri Nilai penegakan integritas-



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
		Kementerian Dalam Negeri;	bebas korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kinerja Kemendagri • Indeks reformasi birokrasi Kemendagri

Dari dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015-2019, maka ditelaah sasaran strategis beserta indikator kinerja yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Iklim Investasi dan Daya Saing Bisnis Daerah	Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Investasi di Daerah • Kajian Potensi dan Peluang Investasi yang dapat ditawarkan Kepada Investor masih terbatas • Kurangnya Daya Dukung Regulasi dan Kebijakan Investasi • Rendahnya Promosi Investasi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Sumber Anggaran 3. Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk Menunjang Promosi Investasi 4. Belum Tersedianya Rencana RUPM Kab. TSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Promosi Investasi 2. Tersedianya Dukungan Tata Ruang Wilayah dalam Investasi 3. Sosialisasi LKPM untuk PMA dan PMDM 4. Terbentuknya Satgas Percepatan Pelaksanaan Perusahaan Kab. TSM
		Lemahnya Data dan Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasaran 2. SDM terbatas dari segi Kompetensi dan Jumlah 3. Belum Adanya Aplikasi Khusus Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pembinaan dan Pengarahan dari Provinsi 2. Adanya Fasilitasi terkait Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Data yang Terintegrasi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Permasalahan DPMPSTP Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Data dan Informasi yang Terintegrasi secara Online	3. dari Provinsi Maupun Pusat Secara Online Adanya Data Registrasi Awal Pada Bidang Pelayanan yang Terbit
		Belum Semua Kewenangan Perizinan diselenggarakan Secara Terpadu	1. Sarana dan Prasarana 2. Sumber Daya Manusia yang Kurang 3. Keterbatasan Anggaran 4. Belum Adanya Aplikasi Online	1. Koordinasi yang Baik dengan Dinas Teknis 2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Ijin 3. SDM Pengelola Perijinan

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak



dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta tata kelola organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja.

Disamping itu juga perlu diperhatikan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan yaitu :

1. Kesederhanaan;
2. Kejelasan;
3. Kepastian waktu dan biaya;
4. Kepastian hukum;
5. Kemudahan akses;
6. Kenyamanan;
7. Memperhatikan kondisi wilayah/geografis;

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pelayanan.



